

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH (BOS) OLEH PEMERINTAH DAERAH DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(Studi Kasus: Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan,
Provinsi Bali)**

Desy Natalia Krisdayanti
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik
Universitas Udayana
E-mail: desy.ldap5@gmail.com

ABSTRAC

Education is a basic human need to live and achieve a better life. One effort to meet the educational needs made the Law Number 20 Year 2003 on National Education System which mandates every citizen aged 7-15 years of compulsory basic education. To further the success of compulsory education and also to reduce the burden of the cost of education, then the government provide School Operational Assistance. The porpose of this research are to know how the implementation BOS by local government and junior high school then what the aspec which influence implementation of this policy. We choose Tabanan Regency to be research area with the sample SMP 1 and SMPN5 Tabanan to see how the implementation of BOS fund in there, because Tabanan is one of the regencies with the lowest matching BOS fund. This study used a qualitative research method of collecting information using in-depth interview, observasi non partisipan and documentation techniques. According to the theory of Edward III, there are four aspects that affect the implementation of BOS fund: communication, resources (human and financial), attitudes and bureaucratic structures. On the four aspects of the synergy between local government and junior high schools are not good, so they must reform and make good governance in education policy.

Key Words : Public Policy, Education, School Operational Assistance

1.Pendahuluan

Indonesia adalah negara dengan penduduk terpadat keempat di dunia, hal itu yang membuat sumber daya manusianya melimpah yang merupakan nilai lebih (potensi) sekaligus menjadi tantangan tersendiri untuk dapat melakukan pembangunan di bidang yang sangat fundamental, yaitu bidang pendidikan. Indonesia memiliki kewajiban untuk berkomitmen dalam memenuhi kebutuhan pendidikan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali, hal ini tertuang dalam UUD pasal 33 ayat 1 “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”

Pemerintah telah berupaya meringankan beban masyarakat akibat dari kenaikan harga BBM yaitu dengan mengalokasikan dana 20% dari APBN untuk pendidikan serta memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Latar Belakang Program Bantuan Operasional Sekolah adalah adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar yang dikenal dengan Wajib Belajar 9 Tahun Walaupun sudah ada payung hukum dan sudah diterbitkannya buku petunjuk teknis pelaksanaan BOS yang selalu direvisi setiap tahun, namun dalam pelaksanaannya masih belum maksimal. Setiap pemerintah daerah terus berusaha melaksanakan program BOS dengan baik dan meminimalisir penyimpangan, demikian juga dengan pemerintah daerah Provinsi Bali. Pelaksanaan BOS di Bali juga masih terdapat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, setidaknya hal itu dapat dilihat dari pemberitaan di dunia maya yaitu adanya dugaan korupsi, keterlambatan pencairan dana, manipulasi laporan, kelebihan dan kekurangan dana akibat kesalahan administrasi pendataan siswa, tidak melibatkan komite sekolah sebagai pengontrol, kurangnya sosialisasi, dan masalah lainnya yang terjadi di semua Kabupaten di Bali, salah satunya adalah Kabupaten Tabanan.

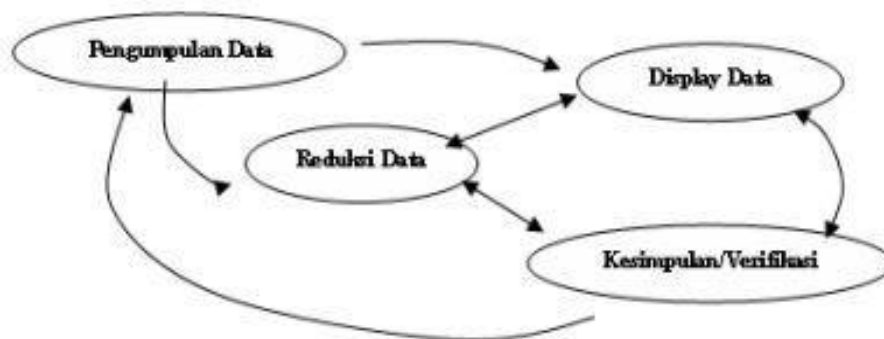
Kebijakan mengenai BOS di Kabupaten Tabanan ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati Tabanan Nomor 120 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Tabanan Tahun 2013. Pihak pemerintah daerah sudah membentuk tim manajemen agar pelaksanaan program

BOS dapat berjalan dengan baik, namun tidak dapat dipungkiri dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, seperti yang dimuat dalam koran bali post tanggal 2-3 Desember 2013 bahwa adanya kejanggalaan dana BOS di Tabanan. Selain itu juga terdapat kesalahpahaman antara pihak pemerintah, sekolah dan masyarakat mengenai aturan penggunaan BOS misalnya dalam hal pengadaan LKS, padahal penggunaan dan larangan dana BOS sudah diatur dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan no 76 tahun 2012, salah satunya melarang dana BOS untuk pembelian LKS, tetapi masyarakat menganggap dana BOS bisa dipakai untuk pembelian LKS, hal ini menandakan masih lemahnya sosialisasi dari pemerintah dan sekolah kepada masyarakat.

Dari pemaparan diatas, untuk itulah kami mengambil judul Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Pemerintah Daerah dan Sekolah (Studi Kasus: Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali) untuk dapat mengetahui bagaimana implementasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh pemerintah daerah Kabupaten Tabanan dan Sekolah. Untuk mengetahui apa saja aspek yang mempengaruhi implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Tabanan, sejauh mana pemerintah daerah Kabupaten Tabanan dan Tim Pelaksana BOS sekolah bersinergi melaksanakan program dana BOS secara good governance, dimana semua sekolah baik negeri maupun swasta di Tabanan menerima dana BOS, tetapi dalam penelitian ini lebih difokuskan pada pengelolaan BOS di SMP sebagai tolak ukur untuk melihat penuntasan wajib belajar 9 tahun dimana hal ini merupakan salah satu dari tujuan BOS. Sampel diambil dari SMP yang pelaksanaannya paling baik yaitu SMPN 1 Tabanan dan SMP yang pelaksanaannya masih kurang yaitu SMPN 5 Tabanan pada tahun ajaran 2012-2014 triwulan tiga.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang kami gunakan adalah sumber data primer (langsung dari narasumber) dan sekunder (dari media cetak, media elektronik, buku, naskah, laporan, website dan arsip lainnya). Teknik sampling non probability sampling dimana dalam penelitian ini tidak memberi peluang yang sama kepada anggota populasi untuk dipilih sebagai informan. Teknik Pengumpulan Data dengan wawancara mendalam (Indepth-Interview), non partisipatif dan dokumentasi. Beberapa cara yang digunakan untuk pemeriksaan keabsahan data seperti yang dikemukakan oleh Moleong (2001; 175-183) yaitu keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, kecukupan refrensi dan uraian yang rinci. Menurut Miles dan Huberman penyajian keempat tahapan kegiatan analisis data dapat dijelaskan sebagaimana berikut:



3. Gambaran Umum Implementasi Bantuan Operasional Sekolah

Kecamatan Tabanan merupakan salah satu dari sepuluh kecamatan yang ada di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Terdapat lima sekolah negeri di Kecamatan Tabanan yaitu SMPN 1, SMPN2, SMPN3, SMPN4, SMPN5 dan dua sekolah swata, yaitu SMP 1 Harapan dan SMP Saraswati. Dalam penelitian ini akan difokuskan pada SMPN 1 yang beralamat di jl Diponogoro no 26 Kelurahan Dajan Peken dan SMPN 5 Tabanan yang beralamat di Jl Yeh Gangga Sudimara. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013

diatur bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program BOS dimana masing-masing pengelola program di tiap tingkatan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Sekolah) diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya. Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah yang berkaitan dengan statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan, pemanfaatan dana, pertanggungjawaban keuangan serta hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah.

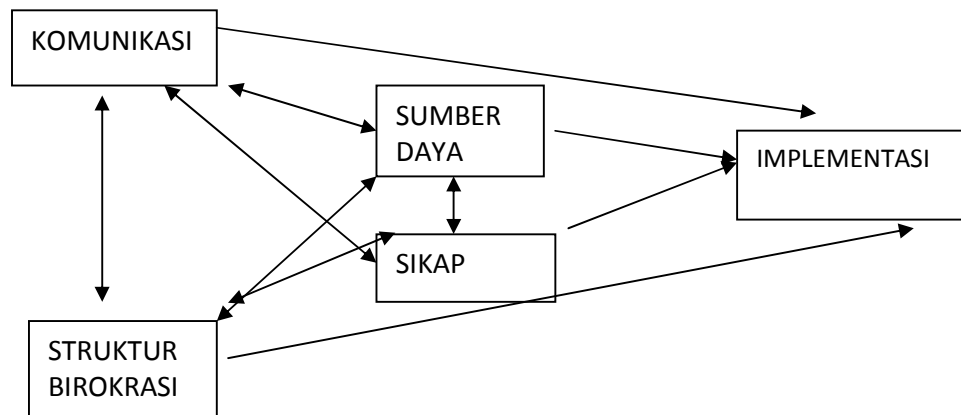
Pada tahun 2005-2010, dana BOS ditransfer langsung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke rekening sekolah. Pemda hanya bertugas untuk memfasilitasi, melakukan pengendalian dan monitoring terhadap alokasi dana bos. Untuk tahun 2011 mekanismenya diubah dengan metode pemindah bukuan dana dari kas negara ke kas daerah dan selanjutnya ditransfer dari kas daerah ke rekening sekolah. Team manajemen BOS provinsi mengatakan bahwa untuk saat ini mekanisme penyaluran BOS ialah melalui hibah kepada pemerintah provinsi, sebab dalam mekanisme sebelumnya (2005-2010), pemerintah pusat menilai pemerintah daerah sering lepas tangan dalam melakukan pengawasan. Selain itu, pemerintah pusat sengaja melibatkan pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya penguatan semangat otonomi daerah, dimana pendidikan merupakan salah satu sektor yang kewenangannya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Dalam APBN 2011, dana BOS masuk dalam komponen dana penyesuaian dan kelompok dana transfer ke daerah agar dana tersebut bisa dikelompokkan ke dalam dana transfer daerah sehingga pengelolaan dan pengawasan dana BOS dapat melibatkan pemerintah daerah dan DPRD. Sehingga penyaluran dana BOS dapat tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Namun disisi lain panjangnya proses birokrasi untuk penyaluran dana bos ke rekening sekolah membuat proses ini membutuhkan waktu yang lama , seperti yang disampaikan oleh Dewan pendidikan.

“Sebaiknya mekanisme penyaluran BOS langsung saja ke rekening sekolah, karena proses birokrasi yang lama, sehingga tidak ada lagi keluhan dari sekolah karena keterlambatan pencairan dana BOS” (Madra Suartana, 55 thn, 14 April 2014)

4. Aspek-aspek yang Mempengaruhi Implementasi BOS

Menurut Edward III ada empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan yaitu komunikasi (communication), sumber daya (resources), disposition atau sikap (attitudes) dan struktur birokrasi (bureaucratic structure). Apabila divisualisasikan akan tampak seperti gambar dibawah ini



a. Komunikasi

Secara umum proses komunikasi melibatkan unsur-unsur yaitu komunikator, pesan, media, penerima pesan dan umpan balik. Komunikasi yang terjadi dalam implementasi BOS adalah sosialisasi berjenjang dari team manajemen BOS Pusat ke team manajemen BOS provinsi Bali, dari team manajemen BOS provinsi Bali ke team manajemen BOS kabupaten Tabanan sebanyak tiga kali dalam setahun, dari team manajemen BOS kabupaten Tabanan ke team manajemen BOS sekolah satu tahun sekali dan dari sekolah kepada siswa dan orang tua melalui pertemuan di awal tahun ajaran baru. Untuk sosialisasi oleh SMPN 5 Tabanan kepada orang tua siswa pada tiga tahun terakhir tidak berjalan dengan baik, namun dengan adanya pergantian kepala sekolah yang baru, tahun ini sosialisasi mulai membaik walaupun respon dari orangtua masih kurang. Banyak orang tua dan siswa hanya sekedar mengetahui adanya bantuan dana BOS tanpa mengetahui secara detail komponen apa saja yang dibiayai oleh dana

BOS yang tertuang dalam buku petunjuk BOS, sehingga mereka menganggap dengan adanya dana BOS, mereka tidak perlu dipungut biaya lagi oleh sekolah. Tentu hal ini menjadi dilema tersendiri bagi pihak sekolah.

Mengenai laporan tentang BOS yang di tempel di papan pengumuman, banyak siswa yang tidak memperhatikan, bahkan tidak mengetahui laporan tersebut. Seperti pengakuan salah satu siswa di SMP 1 bahwa di papan pengumuman hanya ada mading, tidak ada info tentang BOS, padahal dalam buku petunjuk teknis BOS di sebutkan bahwa penggunaan dana BOS diumumkan di papan pengumuman (Formulir BOS-04). Selain itu, laporan yang di tempel juga kurang efektif bila dijadikan satu-satunya media komunikasi dengan orang tua, karena orang tua siswa tidak berada di lingkungan sekolah, sehingga mereka tidak dapat melihat laporan tersebut.

Dalam hal pendataan oleh pemerintah bali juga masih kurang, hal ini terbukti dari adanya kesalahan pendataan dalam penetapan kuota sekolah kecil, sehingga menimbulkan selisih pada dana yang ditransfer. Hal ini seharusnya bisa dihindari ketika sistem administrasi dan komunikasi antara pihak yang terkait dapat berjalan dengan baik. Bentuk komunikasi yang lain yaitu adanya laporan lapangan (Quisioner) oleh Pemerintah dengan respondennya ialah Kepala Sekolah, Guru dan Bendahara Sekolah. Hal ini untuk memudahkan dalam memantau pelaksanaan BOS di sekolah, seperti yang disampaikan oleh Tim Manajemen BOS Tabanan bahwa mereka tidak bisa memantau secara intensif pelaksanaan BOS di sekolah karena urusan di dinas pendidikan tidak hanya tentang BOS, mereka juga harus mengurus hal yang lainnya sehingga Pemda menyerahkan dan mempercayakan kepada sekolah untuk mengelola. Namun dalam quisioner tersebut, yang menjadi responden hanya di dapat dari pihak sekolah. Padahal dalam buku petunjuk BOS bab iv mengatakan bahwa dalam monitoring yang dilakukan oleh tim manajemen BOS provinsi dan kabupaten, responden harus juga berasal

dari siswa dan/atau orang tua siswa penerima bantuan. Hal inilah yang kurang dilakukan oleh pemerintah(pusat atau daerah), laporan tentang BOS ini akan menjadi lebih baik dan tidak memihak satu pihak (netral) ketika siswa dan orang tua siswa sebagai pihak yang mendapat bantuan dana BOS juga dilibatkan sehingga hasil evaluasi bisa dilihat dari berbagai sudut pandang.

b. Sumber Daya

Ada dua sumber daya strategis yang harus dimiliki oleh suatu organisasi., yaitu *Financial resources*, yaitu sumber daya yang berbentuk dana/modal dan *Human resources*, yaitu sumber daya yang berasal dari manusia yang secara tepat dapat disebut modal insani.

Sebelum tahun 2014, Kabupaten Tabanan tidak memberikan dana pendamping BOS, namun pada tahun 2014 Tabanan memberikan dana pendamping Rp 50.000/siswa/ dana tersebut masih sangat minim dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Dana pendamping hanya bisa dipakai untuk membiayai kegiatan yang berhubungan dengan kearifan lokal, misalnya membiayai upacara keagamaan. Hendaknya pemerintah daerah kabupaten tabanan dapat memberikan perhatian yang lebih besar lagi sehingga dana pendamping BOS dapat terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data diatas terlihat bahwa Komitmen pemerintah daerah terhadap pendidikan masih kurang. Saat ini pemerintah provinsi bali juga tidak memberikan dana pendamping karena dana pendidikan dialihkan untuk bantuan siswa miskin, dalam hal ini ketua Dewan Pendidikan di Tabanan telah menyarankan agar sekolah tidak hanya mengandalkan dana BOS, sekolah dapat memungut biaya sekolah kepada orang tua untuk meningkatkan mutu, asalkan bukan untuk pembangunan gedung. Menurut ketua Dewan Pendidikan, pemberian bantuan untuk pendidikan di Kabupaten Tabanan juga belum mencapai 10%, sehingga beliau telah mengusulkan untuk adanya penambahan, tetapi masih belum ada respon yang berarti dari pemerintah, beliau tetap memiliki harapan agar

pemerintah daerah Tabanan bisa memenuhi kebutuhan pendidikan karena pendidikan merupakan sebuah investasi yang sangat penting nantinya untuk menciptakan insan yang unggul dan berkualitas sehingga kabupaten Tabanan dapat menjadi kabupaten yang maju dan mampu bersaing di era global.

Menurut ketua DPRD Komisi 4, dana pendamping hanya mampu diberikan sebesar Rp 50.000 karena faktor kemampuan daerah dan akan sangat keliru apabila dana hanya difokuskan untuk dijadikan pendamping BOS sehingga sektor lain terabaikan. Sudah saatnya diperlukan rumusan standar yang jelas tentang jenis, bentuk dan/atau komponen pembiayaan sekolah sehingga setiap pihak yang berkepentingan dapat berperan serta dalam penyediaannya. Agar standarisasi biaya pendidikan memiliki dasar hukum yang kuat, maka penetapan instrumen yang akan menjadi rambu-rambu para pengelola pendidikan kepada masyarakat sebaiknya diawali dengan penetapan perda pendidikan yang didalamnya juga memuat berbagai hal terkait pengelolaan pendidikan termasuk dalam hal pembiayaan pendidikan (Bali post, 1 Desember 2013).

Apabila standarisasi harga satuan pada seluruh jenis kegiatan sekolah telah tersedia, maka langkah selanjutnya adalah mensupervisi RAPBS untuk memastikan apakah sekolah gratis dapat dilaksanakan atau belum. Langkah supervisi ini penting dilakukan agar tercipta komitmen dan kesepahaman antara penyelenggara pendidikan dengan pemerintah daerah sehingga segala kemungkinan yang terkait dengan pungutan liar dikemudian hari dapat dikurangi sedini mungkin. Selain itu, supervisi dapat pula memberikan rekomendasi bagi sekolah-sekolah yang diperkenankan memungut biaya tambahan dari pihak orang tua baik untuk kegiatan yang berbasis keunggulan lokal maupun kegiatan-kegiatan lain yang bukan termasuk dalam kategori keunggulan lokal, tetapi memiliki korelasi yang sangat erat dalam peningkatan kualitas pembelajaran.

Untuk dapat mengelola dana BOS, diperlukan sumber daya manusia yang berkompeten. Peraturan Pemerintah No. 101/2000 tentang

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil menjelaskan pengertian konsep kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatannya. Kompetensi SDM dapat diklasifikasikan menjadi empat, yaitu kompetensi teknis, yaitu kompetensi mengenai bidang yang menjadi tugas pokok organisasi; Kompetensi Manajerial, yaitu kompetensi yang berhubungan dengan berbagai kemampuan menerapkan konsep dan teknik perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi kinerja unit organisasi; Kompetensi sosial, hal ini dapat dilihat melalui lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal seperti memotivasi dan peran serta masyarakat untuk meningkatkan produktivitas kerja, sedangkan lingkungan eksternal seperti melakukan pola kemitraan, kolaborasi dan pengembangan jaringan kerja serta sikap tanggap terhadap aspirasi dan dinamika masyarakat; Kompetensi intelektual/startegik, yaitu kemampuan merumuskan visi, misi dan strategi dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Untuk memberikan pembekalan pelaksanaan program BOS pemerintah pusat melakukan pelatihan dan bimbingan teknis ke Pemerintah Daerah Provinsi dan Kota/Kabupaten lalu ke Sekolah penerima BOS, sehingga para pelaksana kebijakan dapat lebih memahami isi dari buku petunjuk BOS yang menjadi acuan dalam menjalankan program BOS bagi daerah di Indonesia.

c. Sikap Kerja

Sikap/attitude didefinisikan sebagai pernyataan evaluatif, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan terhadap objek individu atau peristiwa (Robbins dan judge, 2007). Sebagian besar riset dalam perilaku organisasional berhubungan dengan tiga sikap yaitu kepuasan kerja, keterlibatan pekerjaan dan komitmen organisasional. Kepuasan kerja adalah suatu perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang

merupakan hasil dari evaluasi karakteristiknya. Keterlibatan pekerjaan mengukur sejauhmana seseorang memilih suatu pekerjaan, berpartisipasi secara aktif di dalamnya dan menganggap penting tingkat kinerja yang dicapai sebagai bentuk penghargaan diri. Komitmen organisasional menunjukan sejauh mana seseorang memihak sebuah organisasi serta tujuan dan keinginannya mempertahankan keanggotaan dalam organisasi.

Masyarakat memang memerlukan pendidikan yang murah, tetapi pada saat yang sama juga memerlukan pendidikan yang bermutu. Kedua hal itu (murah dan bermutu) tidak selalu bisa berjalan seiring. Dalam kasus tertentu, di mana Pemerintah Daerah tidak mengalokasikan APBD dalam jumlah yang cukup untuk keperluan operasional sekolah, kebijakan pendidikan gratis justru menjadi perangkap. Kualitas pendidikan, yang sudah sering diragukan, akan semakin terpuruk akibat tidak terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah.

Hal ini terlihat ketika masih berstatus RSBI, SMP1 Tabanan mengenakan biaya personal Rp 200.000, tentunya dana tersebut untuk meningkatkan kualitas peserta didik itu sendiri siswa, namun semenjak RSBI di cabut, SMP 1 menetapkan biaya personal Rp 50.000,-/ siswa/bulan yang digunakan untuk kegiatan OSIS dan Kursus Komputer. Alokasi dana yang minim membuat sekolah tidak dapat berbuat banyak untuk meningkatkan kualitas, sekolah tidak dapat mengikuti lomba-lomba karena tidak ada biaya transportasi, pelatihan, konsumsi dll. Biaya pelatihan guru juga kurang, prestasi guru dan siswa pun menurun. Hal ini terlihat dari pernyataan dari Kepala Sekolah SMP 1 Tabanan

“Tidak ada penghargaan yang diberikan kepada kepek dan guru, apalagi semenjak ada dana BOS, beban kerja menjadi bertambah misalnya dalam pembuatan RKAS. Hal ini dapat menurunkan motivasi kerja, belum lagi beban moral yang harus di tanggung, tanggung jawab untuk mengelola BOS itu besar, tetapi orang luar berasumsi sekolah enak mendapat dana besar. Jika masyarakat luar tidak percaya dengan sekolah, harusnya tiap siswa punya rekening sendiri saja, jadi dana BOS langsung ditransfer ke rekening siswa. Daripada banyak ada asumsi negatif,

padahal sekolah tidak berani main-main dengan dana, karena publik menyoroti “ (Nyoman Sarjana, 50 thn, 14 April 2014).

Pemda sebagai otoritas tertinggi di daerah telah menyerukan wajib belajar 9 tahun tanpa pemberian dana tambahan yang besar. Orang tua murid yang belum memahami komponen dana BOS menganggap bahwa anak mereka memang berhak mendapat pendidikan tanpa harus memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar biaya pendidikan, hal ini yang merugikan pihak sekolah sebagai penyelenggara pendidikan untuk meningkatkan kualitas murid.

Mengenai pemasangan spanduk “bebas biaya pungutan” di SMP 1 Tabanan sudah terlihat memasang spanduk tersebut sedangkan di SMP 5 Tabanan belum memasang spanduk “bebas biaya pungutan”, padahal hal ini sudah diatur dalam juknis BOS, mengenai tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen BOS Sekolah dimana salah satunya berbunyi “ Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan” bahkan format spanduk juga terlampir dalam formulir BOS-05 dan telah disediakan dana pembuatan spanduk dalam komponen pembiayaan no dua yaitu pembuatan spanduk dalam rangka penerimaan siswa baru”. Berarti dalam hal ini, SMP 1 Tabanan sudah memiliki sikap yg baik untuk menaati buku petunjuk BOS.

d Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah bentuk formal antara individu dan kelompok berkenaan dengan alokasi tugas, tanggung jawab dan otoritas dalam organisasi. Ada empat dimensi penting yang menentukan struktur organisasi yaitu pembagian kerja, pendelegasian wewenang, departementalisasi dan rentang kendali. Ketentuan administratif yang harus dikerjakan sekolah tidak sebanding dengan jumlah pengelola di sekolah yang hanya dipersyaratkan terdiri dari 3 unsur (penanggung jawab, bendahara, satu orang tua siswa). Untuk SK pembentukan

manajemen BOS diganti 1 tahun sekali, untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada dalam Manajemen BOS maka setiap satu tahun sekali diganti, namun hal ini juga disesuaikan dengan kondisi di sekolah. Orang yang duduk dalam manajemen BOS sebaiknya orang yang benar-benar sesuai dengan bidangnya, misalnya orang yang memiliki background keuangan yang dapat mengambil posisi bendahara sehingga mereka lebih berkompeten. Tim Manajemen BOS Tabanan memiliki harapan agar adanya sinergitas yang baik antara pemerintah dengan sekolah dalam memajukan dunia pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing khususnya untuk melaksanakan kebijakan BOS. Upaya pelaksanaan program BOS secara transparan dapat terlihat dari susunan Tim Manajemen BOS sekolah yang memasukan unsur orang tua siswa sehingga diharapkan adanya kontrol oleh masyarakat diluar sekolah dalam perencanaan maupun pelaksanaan BOS.

5. Kesimpulan

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah memiliki peran yang sangat besar untuk meningkatkan mutu pendidikan, namun komitmen untuk menjalani peran tersebut masih belum terlihat, salah satunya seperti yang terjadi pada pemerintah daerah Kabupaten Tabanan yang perhatiannya terhadap pendidikan masih kurang. Hal ini ditandai dengan minimnya dana pendamping BOS jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Pemerintah pusat memiliki tanggungjawab dalam menghindari terjadinya kesenjangan yang mencolok antar daerah, baik dalam proses maupun kinerja sektor pendidikan, untuk itu pemerintah harus segera membuat standarisasi pembiayaan. Diperlukan standarisasi penyaluran dana bantuan yang tegas dari pemerintah, termasuk menyeleksi dengan ketat sekolah-sekolah yang berhak mendapatkan dana bantuan, bahkan juga diperlukan aturan yang ketat terhadap para pelaku korupsi dana bantuan pendidikan. *Good governance* diperlukan karena tuntutan dari masyarakat kepada pemerintah untuk

melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Institusi dari *good governance* meliputi tiga domain yaitu *state* (negara atau pemerintahan), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha) dan *society* (masyarakat) yang saling berinteraksi dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Konsep akuntabilitas dalam bidang pendidikan tidak mudah dan akan menghadapi kendala baik dari pihak internal maupun eksternal sekolah yaitu, siswa (peserta didik), guru (pendidik), administrator pendidikan, lembaga pendidikan dan masyarakat. Masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang berbeda dan sering tidak sejalan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan diperlukan biaya yang besar, namun karena kemampuan pemerintah terbatas, diharapkan adanya keikutsertaan masyarakat dan investasi dari pihak swasta. Di lain pihak masyarakat menginginkan mutu pendidikan yang tinggi tetapi dengan pembiayaan yang rendah, oleh karena itu perlu ditentukan keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut. Implementasi BOS dipengaruhi oleh 4 aspek yaitu, komunikasi, sumber daya (manusia dan dana), sikap, dan struktur birokrasi. Implementasi BOS di Provinsi Bali, khususnya di Kabupaten Tabanan dengan sampel sekolah SMP 1 Tabanan dan SMP 5 Tabanan secara menyeluruh dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur dinilai masih kurang, untuk itu perlu adanya upaya pembenahan dari semua pihak agar setiap tahun menjadi lebih baik lagi.

6.Saran

Perlunya peran aktif dari berbagai pihak seperti independen yaitu *education watch*, LSM, bawasda (Badan Pengawasan Daerah), Dewan Pendidikan, komite sekolah (paguyuban wali murid) yang tergabung dalam tim pengawas. Perlunya sistem komunikasi antara sekolah dengan orang tua, masyarakat, dan komite sekolah dalam hal program dan pertanggungjawaban keuangan, misalnya sekolah dapat membuka website sebagai media komunikasi di dunia maya. Perlunya pemahaman yang baik bagi masyarakat karena masyarakat masih menganggap kebijakan BOS

identik dengan sekolah gratis. Saat ini, BOS tidak identik dengan sekolah gratis, namun lebih tepat dengan istilah gratis terbatas. Konsep Sekolah Gratis Terbatas ini dapat bermakna hanya siswa miskin/kurang mampu yang digratiskan dari segala iuran, sedangkan siswa mampu masih dipungut biaya namun lebih kecil dibandingkan sebelum adanya dana BOS, terakhir perlu adanya evaluasi dan kajian berkelanjutan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tentang kebutuhan riil operasional sekolah, agar ketentuan/rambu-rambu dalam penggunaan dana BOS dapat lebih mendekati kebutuhan masing-masing sekolah serta dapat menyentuh semua lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Faried. 2011. *Teori dan Konsep Administrasi (Dari Pemikiran Paradigmatik Menuju Redefinisi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta : Kencana.
- Bahan Pembelajaran Diklat Prajabatan Golongan III (Edisi ketiga Cetakan Pertama 2011) Kementrian Pendidikan Nasional.
- Darise, Nurlan. 2007. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah*. Jakarta: PT macanan Jaya Cemerlang.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Fatah, Nanang. 2012. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Hamadah, Zulfiah. 2009. *Sumber-Sumber, Efisiensi dan Efektivitas Pembiayaan Pendidikan*
- Hasbullah. 2006. *Otonomi Pendidikan (kebijakan otonomi daerah dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Irianto, Agus. 2011. *Pendidikan Sebagai Investasi Dalam Pembangunan Suatu Bangsa*. Jakarta : Kencana.
- Kencana, inu. 2003. *Sistem Administrasi Negara*. Bandung: Sinar Grafika.
- Lembaga Administrasi Negara. 2003. *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI
- Munadi,Muhamad. 2011. *Kebijakan Publik Di Bidang Pendidikan*. Jogja :AR-Ruzz Media
- Nazir,Moh. 1983. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Nurlela.2007. *Etika Organisasi Pemerintah*. Sawangan: Departemen Pendidikan Nasional.
- Nugroho D, Riant.2006 . *Kebijakan Publik untuk negara-negara berkembang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Parson, Wayne. 2001. *Publik Policy (Pengantar teori dsn praktik analisis kebijakan*. Jakarta: Kencana
- Sagala, Syaeful, *Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat*, Jakarta: Nimas Multima, 2004.
- Siagian, Sondang P. 1999. *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi dan Strateginya)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sunyonto, Danang. 2002. *Perilaku Organisasional*. Yogyakarta: CAPS.
- Sutrisno, Edi. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Surabaya: Kencana.
- Syarifuddin. 2008. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Yogyakarta: Kencana.

Wursanto. 2002. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta: ANDI
Wahab, Solichin Abdul. 2001. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Negeri Malang.
Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik teori, proses, dan study kasus*. Yogyakarta : CAPS

Website:

(<http://edukasi.kompas.com/read/2012/08/30/10025539/Wajib.Belajar.Harusnya.Jamin.Pendidikan>.) diunduh tgl 16 Januari 2014
(<http://edukasi.kompas.com/read/2011/09/26/19290993/Pemerintah.Siapkan.Wajib.Belajar.12.Tahun>.) diunduh tgl 15 Pebruari 2014

Peraturan Perundangan:

UUD RI Tahun 1945 pasal 33 Amandemen keempat.
UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .
UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
UU Nomor 33 Tahun 2004 ttg Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
UU Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
UU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Otonomi Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 76 Tahun 2012.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 101 Tahun 2013.